



Melalui Musrenbang RKPD, Pemkab Mamuju Sinergi Pemprov Sulbar Bangun Infrastruktur.

MAMUJU, Terbitsulbar.com – Pemerintah kabupaten Mamuju kembali menyerap aspirasi publik melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025.

Musrenbang yang dilaksanakan di kantor Bupati Mamuju ini dihadiri Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakhrulloh, dan sejumlah stakeholder. Rabu, (27/3/2024).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Mamuju, Hj. Sitti Sutinah Suhardi, menyampaikan harapan kepada Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh.

Sutinah membeberkan bahwa masih terdapat sejumlah

infrastruktur yang memerlukan intervensi bersama pemerintah provinsi terutama di tiga titik jalan yang masih sangat riskan dan belum dapat dibiayai menggunakan APBD Mamuju.

Tiga ruas jalan yang dimaksud antara lain, jalan poros Tapalang Barat, jalan Desa Bela-Kopeang, serta jalan Bonehau-Kalumpang.

Selain itu, Sutinah mengharapkan alokasi dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang hampir tiap tahun dialokasikan untuk membantu pemerintah daerah, kembali dikucurkan oleh pemerintah provinsi, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan program pembangunan di Ibu Kota Sulbar ini.

Sementara itu, Pj. Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrulloh, dalam arahannya menyampaikan telah memerintahkan kepala Dinas PUPR serta Bappeda Sulbar agar dapat duduk bersama dengan Dinas PU dan Bappeda Kabupaten Mamuju untuk segera melakukan sinkronisasi program pembangunan terutama pembangunan infrastruktur jalan, sehingga ditargetkan tidak ada lagi jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.

“Kalau bisa tahun ini semua jalan sudah bisa dibuka walaupun tidak langsung pengerasan, kita upayakan diintervensi secara bertahap,” kata Pj. Gubernur Sulbar yang juga selaku Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ini.

Terkait dana BKK yang diharapkan Pemkab Mamuju, Pj. Gubernur pengganti Akmal Malik ini, mengakui belum dapat mengalokasikan anggaran dimaksud, sebab saat ini Pemerintah Provinsi Sulbar tengah berkonsentrasi dalam menyelesaikan berbagai tanggung jawab yang diharuskan, seperti pembayaran lahan bandara, maupun pembayaran jalan arteri Mamuju.

“Ini kita lakukan agar pejabat definitif nanti tidak lagi harus dipusingkan mengurus kewajiban pembayaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, sehingga nanti dapat lebih berkonsentrasi melaksanakan pembangunan.” sebut Zudan Arif Fakrulloh. (*Ts)